

## **Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money***

**Elita Lajulava<sup>1</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Rosalinda wahyuni<sup>3</sup>**

IAIN Kediri

<sup>1</sup>*elitalajulava1@gmail.com*, <sup>2</sup>*lukman085h@gmail.com*,  
*wahyunirosalinda@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the financial performance of local governments using the value of money concept. This research was carried out by taking data for 4 years, namely from 2019 to 2022. The research used was quantitative. Which uses APBD data and the realization of the Kediri Regency APBD, which is expected to provide an overview of financial report analysis as a basis for assessing financial performance using the value for money approach. In 2019, Kediri Regency's regional income was 2,943.21 billion, with a realized income of 2,998.84 billion. In 2020, Kediri Regency's regional income was 2,945.41 billion, with a realized income of 2,835.33 billion. In 2021, Kediri Regency's regional income will be 2,777.29 billion, with a realized income of 2,923.11 billion. In 2022, Kediri Regency's regional income will be 2,774.77 billion, with a realized income of 3,056.07 billion.*

**Keywords:** *Performance, Value Of Money, economics*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan konsep Value Of Money. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data selama 4 tahun yaitu dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022. Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Yang menggunakan data APBD dan realisasi APBD Kabupaten Kediri yang nantinya diharapkan memberikan gambaran tentang analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan value for money. Pada tahun 2019 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.943,21 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.998,84 Miliar. Pada tahun 2020 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.945,41 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.835,33 Miliar. Pada tahun 2021 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.777,29 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.923,11 Miliar. Pada tahun 2022 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.774,77 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 3.056,07 Miliar.*

**Kata Kunci:** *Kinerja, Value Of Money, Ekonomi*

## PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan merupakan lembaga sektor publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Lembaga pemerintahan lebih condong kepada suatu organisasi politik daripada organisasi ekonomi apabila dibanding dengan organisasi non-profit lainnya (Kusuma, 2016). Pemerintah pusat memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah agar bisa membangun serta mengelola daerah masing-masing dengan baik. Hal tersebut sering dinamakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 merupakan sebuah wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom agar daerah tersebut dapat mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya sendiri sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh daerah memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Urusan pemerintahan daerah seperti pemilihan pemimpin daerah, pemungutan pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan seluruh sumberdaya lain yang ada di daerah. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku (Lamuda, 2019).

Undang-Undang No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah SAP 2021 memerintahkan pemerintah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi yang akurat tentang seluruh transaksi yang dilaksanakan dan situasi keuangan lembaga pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah (Hakim, 2021).

Kinerja pemerintah sangat mempengaruhi akan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Maryam, 2022). Pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai organisasi sektor publik dalam menjalankan birokrasi pemerintahan yang perannya tidak dapat dialihkan ke pihak swasta. Pada era sekarang, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dipertemukan dengan berbagai tuntutan baik sisi eksternal atau

internal. Pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah harus maksimal dan sesuai standar karena hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja pemerintah sangat dibutuhkan (Setiawina, 2015).

Tingkat ekonomi, efektif, serta efisien, suatu lembaga pemerintah dapat dilihat dengan mengetahui tingkat input, output, dan outcome. Input merupakan sumberdaya yang dipergunakan untuk mengimplementasi suatu program, kebijakan dan berbagai aktivitas. Output merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah aktivitas, program, dan kebijakan. Dengan melakukan perbandingan keluaran bisa dianalisis apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana (Poli, 2020). Outcome adalah sebuah dampak yang diterima dari sebuah kegiatan yang dijalankan. Dengan maksud lain Outcome yaitu hasil yang dicapai suatu kegiatan atau program diperbandingkan dengan hasil yang diharapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah rancangan keuangan tahunan daerah yang disahkan sesuai dengan peraturan daerah yang menjadi instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBN mendukung efektivitas dan kapabilitas pemerintah daerah. APBN digunakan sebagai penentu besaran pendapatan dan pengeluaran, dan mempermudah proses pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, serta sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah (Putra, 2020).

Berikut ini merupakan tabel laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2019-2022

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	Pendapatan Daerah	2.943,21 M	2.998,84 M	101.89
	Belanja			
TAHUN	URAIAN	ANGGARAN 3.220,46 M	REALISASI 2.991,17 M	% 92.88
	Pendapatan Daerah	2.943,21 M	2.998,84 M	101.89
2019	Belanja	3.220,46 M	2.991,17 M	92.88
	Pembiayaan	217,25 M	396,93 M	182.71

2020	Pendapatan Daerah	2.945,41 M	2.835,33 M	96.26
	Belanja	3.415,51 M	2.832,28 M	82.92
	Pembiayaan	470,1 M	564,64 M	120.11
2021	Pendapatan Daerah	2.777,29 M	2.923,11 M	105.25
	Belanja	3.168,89 M	2.937,42 M	92.70
	Pembiayaan	391,6 M	573,34 M	146.41
2022	Pendapatan Daerah	2.774,77 M	3.056,07 M	110.14
	Belanja	3.189,86 M	2.775,83 M	87.02
	Pembiayaan	415,09 M	525,24 M	126.53

Dari tabel realisasi anggaran tersebut menunjukkan jika laporan realisasi anggaran Kabupaten Kediri adalah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jika dilihat dari tahun 2019-2022 pendapatan daerah Kabupaten Kediri mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahunnya meskipun secara tidak signifikan. Dikarenakan masih mengalami pemulihan dari adanya pandemi Covid-19.

Pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan yaitu untuk menyajikan informasi sebagai bentuk Akuntabilitas (pertanggung jawaban) atas sumber yang dipercaya. Sehingga pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya apakah berhasil atau tidak. Akuntabilitas sektor publik juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Governance (Pramono, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan pada proses inferensi komparatif dan analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan deskripsi data secara

tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak termasuk dalam terminologi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif (Zed Mestika, 2004).

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Yang menggunakan data APBD dan realisasi APBD Kabupaten Kediri yang nantinya diharapkan memberikan gambaran tentang analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan value for money.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari web DJPK Kabupaten Kediri yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri periode 2019-2022. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Berdasarkan sumber- sumber yang diperoleh dari literature yang membahas tentang konsep value for money.

Variabel dalam penelitian ini adalah value for money dan indikator kinerja kunci pada Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kediri. Value for money berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Data

#### 1. Anggaran APBD dan realisasinya 1 Januari 2019-31 Desember 2019

Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	2.943,21 M	2.998,84 M
PAD	391,00 M	457,76 M
Pajak Daerah	175,00 M	195,37 M
Retribusi Daerah	30,84 M	29,34 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,62 M	8,98 M

Lain-Lain PAD yang Sah	176,54 M	224,07 M
TKDD	2.256,87 M	2.181,65 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.256,87 M	2.181,65 M
Pendapatan Lainnya	295,34 M	359,43 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	166,59 M	231,35 M
Pendapatan Hibah	128,69 M	128,07 M
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,06 M	0,00 M
<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.220,46 M</b>	<b>2.991,17 M</b>
Belanja Pegawai	1.291,97 M	1.069,43 M
Belanja Pegawai	1.291,97 M	1.069,43 M
Belanja Barang Jasa	633,89 M	657,55 M
Belanja Barang dan Jasa	633,89 M	657,55 M
Belanja Modal	672,29 M	577,46 M
Belanja Modal	672,29 M	577,46 M
Belanja Lainnya	622,31 M	686,73 M
Belanja Bunga	0,00 M	0,00 M

Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M
Belanja Hibah	58,77 M	98,29 M
Belanja Bantuan Sosial	49,03 M	51,55 M
Belanja Tidak Terduga	8,05 M	2,20 M
Belanja Bagi Hasil	24,29 M	32,95 M
Belanja Bantuan Keuangan	482,17 M	501,73 M
Surplus/(Defisit)	-277,25 M	7,67 M
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>217,25 M</b>	<b>396,93 M</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	297,47 M	556,93 M
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	297,37 M	556,40 M
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,10 M	0,53 M

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	80,23 M	160,00 M
Pembentukan Dana Cadangan	80,00 M	160,00 M
Penyertaan Modal Daerah	0,23 M	0,00 M
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	0,00 M
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00 M	0,00 M

Pada tahun 2019 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.943,21 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.998,84 Miliar. Anggaran belanja daerah pada tahun 2019 adalah 3.220,46M dengan realisasinya sebesar 2.991,17 Miliar. Hal ini mengakibatkan difisit pada anggaran belanja sebesar 277,25 Miliar dan surplus pada realisasi belanja sebesar 7,67 Miliar. Namun karena ada jumlah pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya, menyebabkan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar untuk 297,37 Miliar anggaran dan 556,40 Miliar untuk jumlah realisasi.

2. Anggaran APBD dan realisasinya 1 Januari 2020-31 Desember 2020

<b>Akun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Pendapatan Daerah	<b>2.945,41 M</b>	<b>2.835,33 M</b>

PAD	424,92 M	494,41 M
Pajak Daerah	195,53 M	215,30 M
Retribusi Daerah	28,33 M	25,58 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,94 M	10,08 M
Lain-Lain PAD yang Sah	192,13 M	243,45 M
TKDD	2.197,61 M	2.033,31 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.197,61 M	2.033,31 M
Pendapatan Lainnya	322,87 M	307,61 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	195,33 M	172,07 M
Pendapatan Hibah	127,49 M	131,66 M
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,06 M	3,88 M
<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.415,51 M</b>	<b>2.832,28 M</b>
Belanja Pegawai	1.329,25 M	1.020,71 M
Belanja Pegawai	1.329,25 M	1.020,71 M
Belanja Barang Jasa	661,22 M	577,28 M

Belanja Barang dan Jasa	661,22 M	577,28 M
Belanja Modal	685,65 M	400,75 M
Belanja Modal	685,65 M	400,75 M
Belanja Lainnya	739,39 M	833,55 M
Belanja Bunga	0,00 M	0,00 M
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M
Belanja Hibah	140,15 M	151,19 M
Belanja Bantuan Sosial	79,85 M	71,23 M
Belanja Lainnya	0,00 M	0,00 M
Belanja Tidak Terduga	11,00 M	88,43 M
Belanja Bagi Hasil	22,47 M	22,24 M
Belanja Bantuan Keuangan	485,92 M	500,45 M
Surplus/(Defisit)	-470,10 M	3,05 M
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>470,10 M</b>	<b>564,64 M</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	470,10 M	564,64 M
Sisa Lebih Perhitungan		
Anggaran Tahun Sebelumnya	430,00 M	524,63 M
Pencairan Dana Cadangan	40,00 M	40,00 M
Penjualan Kekayaan Daerah		
yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,10 M	0,01 M
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00 M	0,00 M
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M
Penyertaan Modal Daerah	0,00 M	0,00 M
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	0,00 M
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00 M	0,00 M

Pada tahun 2020 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.945,41 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.835,33 Miliar, terdapat kenaikan anggaran pendapatan walau sedikit di banding tahun 2019. Anggaran belanja daerah pada tahun 2020 adalah 3.415,51 Miliar dengan realisasinya sebesar 2.832,28 Miliar. Hal ini mengakibatkan difisit pada anggaran belanja sebesar 470,10 Miliar dan surplus pada realisasi belanja sebesar 3,05 Miliar. Namun karena ada jumlah pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya, menyebabkan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SiLPA) sebesar untuk 430,00 Miliyar anggaran dan 524,63 Miliyar untuk jumlah realisasi.

3. Anggaran APBD dan realisasinya 1 Januari 2021-31 Desember 2021

<b>Akun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Pendapatan Daerah	<b>2.777,29 M</b>	<b>2.923,11 M</b>
PAD	425,69 M	513,77 M
Pajak Daerah	210,02 M	211,90 M
Retribusi Daerah	26,34 M	26,81 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,92 M	10,53 M
Lain-Lain PAD yang Sah	180,41 M	264,54 M
TKDD	2.198,81 M	2.158,75 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.198,81 M	2.158,75 M
Pendapatan Lainnya	152,78 M	250,59 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	131,87 M	242,72 M
Pendapatan Hibah	20,92 M	7,86 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai	0,00 M	0,00 M

Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan		
Belanja Daerah	<b>3.168,89 M</b>	<b>2.937,42 M</b>
Belanja Pegawai	1.242,77 M	1.045,36 M
Belanja Pegawai	1.242,77 M	1.045,36 M
Belanja Barang Jasa	738,97 M	733,40 M
Belanja Barang dan Jasa	738,97 M	733,40 M
Belanja Modal	416,19 M	319,31 M
Belanja Modal	416,19 M	319,31 M
Belanja Lainnya	770,96 M	839,36 M
Belanja Hibah	87,52 M	131,72 M
Belanja Bantuan Sosial	82,25 M	84,09 M
Belanja Tidak Terduga	52,31 M	34,26 M
Belanja Bagi Hasil	23,67 M	23,89 M
Belanja Bantuan Keuangan	525,21 M	565,39 M
Surplus/(Defisit)	-391,60 M	-14,31 M
Pembiayaan Daerah	<b>391,60 M</b>	<b>573,34 M</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	396,60 M	578,34 M
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	387,05 M	567,69 M
Penerimaan Kembali Pemberian	9,55 M	10,65 M

Pinjaman Daerah		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,00 M	5,00 M
Penyertaan Modal Daerah	5,00 M	5,00 M

Pada tahun 2021 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.777,29 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.923,11 Miliar, terjadi penurunan anggaran pendapatan di banding tahun 2020. Anggaran belanja daerah pada tahun 2021 adalah 3.168,89 Miliar dengan realisasinya sebesar 2.937,42 Miliar. Hal ini mengakibatkan difisit pada anggaran belanja sebesar -391,60 Miliar dan anggaran realisasi belanja sebesar -14,31 Miliar. Namun karena ada jumlah pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya, menyebabkan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar untuk 387,05 Miliar anggaran dan 567,69 Miliar untuk jumlah realisasi.

4. Anggaran APBD dan realisasinya 1 Januari 2022-31 Desember 2022

<b>Akun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Pendapatan Daerah	<b>2.774,77 M</b>	<b>3.056,07 M</b>
PAD	454,11 M	661,16 M
Pajak Daerah	204,40 M	249,54 M
Retribusi Daerah	23,48 M	26,37 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,07 M	11,15 M
Lain-Lain PAD yang Sah	216,17 M	374,09 M
TKDD	2.163,54 M	2.128,63 M

Pendapatan Transfer Pemerintah		
Pusat	2.163,54 M	2.128,63 M
Pendapatan Lainnya	157,11 M	266,28 M
Pendapatan Transfer Antar		
Daerah	149,37 M	234,37 M
Pendapatan Hibah	7,74 M	17,48 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai		
Dengan Ketentuan Peraturan		
Perundang Undangan	0,00 M	14,42 M
<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.189,86 M</b>	<b>2.775,83 M</b>
Belanja Pegawai	1.142,99 M	1.014,46 M
Belanja Pegawai	1.142,99 M	1.014,46 M
Belanja Barang Jasa	795,58 M	831,48 M
Belanja Barang dan Jasa	795,58 M	831,48 M
Belanja Modal	434,53 M	346,30 M
Belanja Modal	434,53 M	346,30 M
Belanja Lainnya	816,75 M	583,59 M
Belanja Hibah	114,34 M	169,50 M
Belanja Bantuan Sosial	62,37 M	114,12 M
Belanja Tidak Terduga	45,87 M	3,06 M
Belanja Bagi Hasil	24,61 M	23,64 M

Belanja Bantuan Keuangan	569,56 M	273,26 M
Surplus/(Defisit)	-415,09 M	280,24 M
Pembiayaan Daerah	<b>415,09 M</b>	<b>525,24 M</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	433,88 M	559,02 M
Sisa Lebih Perhitungan		
Anggaran Tahun Sebelumnya	433,88 M	559,02 M
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18,78 M	33,78 M
Pembentukan Dana Cadangan	15,00 M	30,00 M
Penyertaan Modal Daerah	3,78 M	3,78 M

Pada tahun 2022 pendapatan daerah kabupaten kediri sebesar 2.774,77 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 3.056,07 Miliar. Anggaran belanja daerah pada tahun 2021 adalah 3.189,86 Miliar dengan realisasinya sebesar 2.775,83 Miliar. Hal ini mengakibatkan difisit pada anggaran belanja sebesar 415,09 Miliar dan surplus pada anggaran realisasi belanja sebesar 280,24 Miliar. Namun karena ada jumlah pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya, menyebabkan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar untuk 433,88 Miliar anggaran dan 559,02 Miliar untuk jumlah realisasi.

#### 1. Ekonomis

Tingkat ekonomis dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan tingkat biaya yang di keluarkan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Tingkat ekonomis bisa dilihat dengan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya. Berikut ini hasil analisis rasio ekonomis dari data APBD kabupaten kediri (Mawardi, 2022) :

$$\text{rasio ekonomis 2019} = \frac{2.991,17 \text{ M}}{3.220,46 \text{ M}} \times 100\% = 92.88\%$$

$$\text{rasio ekonomis 2020} = \frac{2.832,28 \text{ M}}{3.415,51 \text{ M}} \times 100\% = 82.92\%$$

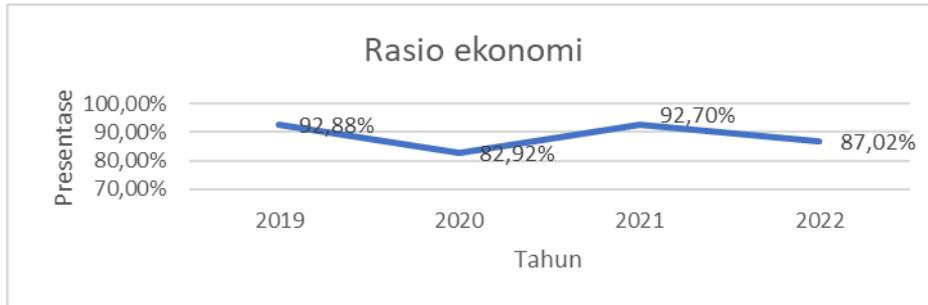
$$\text{rasio ekonomis 2021} = \frac{2.937,42 \text{ M}}{3.168,89 \text{ M}} \times 100\% = 92.7\%$$

$$\text{rasio ekonomis 2022} = \frac{2.775,83 \text{ M}}{3.189,86 \text{ M}} \times 100\% = 87.02\%$$

Rasio Ekonomis Daerah Kabupaten Kediri 2019-2022

Tahun	Presentase	Hasil
2019	92.88%	Ekonomis
2020	82.92%	Ekonomis
2021	92.7%	Ekonomis
2022	87.02%	Ekonomis

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hasil rasio ekonomis adalah sebagai berikut :



Pada perhitungan rasio ekonomis dari anggaran dan realisasi APBD daerah kabupaten kediri tahun 2019-2022 stabil dan tetap kurang dari 100% atau berada di taraf ekonomis. Pada tahun 2019 kabupaten kediri melakukan pengeluaran yang paling tinggi sebesar 2.991,17 M dengan nilai rasio ekonomi 92.88% yang masih termasuk taraf ekonomis. tahun berikutnya pengeluaran kabupaten kediri rasio ekonomi kabupaten kediri membaik dengan nilai presentase 82.92% turun 9.96% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 merupakan kenirja terbaik kabupaten kediri apabila dilihat dari aspek rasio ekonomis . pada tahun 2021 rasio ekonomi kabupaten naik kembali yang menandakan kenaikan pengeluaran dengan presentase rasio ekonomi 92.70%. kembali membaik pada tahun 2022 dengan presentase rasio ekonomi 87.02%.

Pada tahun 2019, realisasi belanja kabupaten kediri memang berada di bawah anggaran belanja sebesar 3.220,46 M dan realisasinya sebesar 2.991,17 M. Namun pada belanja barang dan jasa melebihi anggaran sebesar 633,89 M namun ter realisasi sebesar 657,55 M. Pada belanja lain-lain dengan anggaran sebesar 622,31 M namun direalisasikan sebesar 686,73 M. Hal tersebut di akibatkan oleh beberapa pos yang melebihi anggaran yang disediakan, antara lain belanja hibah 98,29 M; belanja bantuan sosial 51,55 M; belanja bagi hasil 32,95 M; belanja bantuan keuangan 501,73 M.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran kabupaten kediri berada di bawah anggaran dan masih masuk ke dalam taraf ekonomis . dengan anggaran belanja yang disediakan sebesar 3.415,51 M dan direalisasikan sebesar 2.832,28 M. Namun pada belanja lainnya ada beberapa yang di realisasikan melebihi dari anggaran yang disediakan 739,39 M namun pada realisasinya sebesar 833,55 M. Berada pada pos antara lain, belanja hibah yang dianggarkan sebesar 140,15 M direalisasikan 151,19 M, belanja tak terduga dengan anggaran 11,00 M direalisasikan berlebih sampai 803.94% sebesar 88,43 M, dan pada belanja bantuan keuangan dianggarkan 485,92 M direalisasikan sebesar 500,45 M.

Sama seperti pada tahun sebelumnya pada tahun 2021 realisasinya masih berada di bawah anggaran yang disediakan sebesar 3.168,89 M dan di realisasikan 2.937,42 M. Dan pada belanja lainnya masih melebihi dari anggaran yang disediakan 770,96 M namun direalisasikan sebesar 839,36 M. Pos pada belanja lain yang melebihi dari anggaran antara lain, belanja hibah sebesar 87,52 M yang disediakan namun direalisasikan sebesar 131,72 M. Pada belanja bantuan sosial disediakan anggaran 82,25 M direalisasikan sebesar 84,09 M. Belanja bantuan keuangan direalisasikan sebesar 565,39 M namun hanya dianggarkan sebesar 525,21 M.

Pada tahun 2022 dana yang dianggarkan untuk kabupaten kediri sebesar 3.189,86 M dan direalisasikan sebesar 2.775,83 M sehingga masih masuk kedalam kategori ekonomis dilihat dari rasio presentasinya sebesar 87.02% namun pada beberapa akun belanja daerah memiliki realisasi yang melebihi dari anggaran yaitu pada akun Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial

## 2. Efisiensi

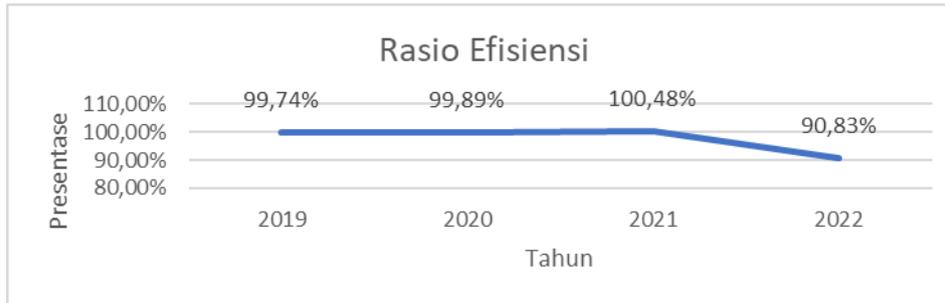
Efisiensi merupakan pencapaian dari adanya pengeluaran yang maksimal dengan pendapatan tertentu atau penggunaan pendapatan yang rendah untuk mendapatkan pengeluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input berkaitan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Tingkat efisiensi ini dilihat dari presentase hasil perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut ini hasil analisis rasio efisiensi :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2019} &= \frac{2.991,17 \text{ M}}{2.998,84 \text{ M}} \times 100\% = 99.74\% \\ \text{Rasio Efisiensi 2020} &= \frac{2.832,28 \text{ M}}{2.835,33 \text{ M}} \times 100\% = 99.89\% \\ \text{Rasio Efisiensi 2021} &= \frac{2.937,42 \text{ M}}{2.923,11 \text{ M}} \times 100\% = 100.48\% \\ \text{Rasio Efisiensi 2022} &= \frac{2.775,83 \text{ M}}{3.056,07 \text{ M}} \times 100\% = 90.83\% \end{aligned}$$

Rasio Efisiensi Daerah Kabupaten Kediri 2019-2022

Tahun	Presentase	Hasil
2019	99.74%	Efisien
2020	99.89%	Efisien
2021	100.48%	Tidak efisien
2022	90.83%	Efisien

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hasil rasio ekonomis adalah sebagai berikut :



Dilihat dari rasio belanja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan namun masih dikatakan efisien, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan walau tidak signifikan pada rentan tersebut. Untuk tahun 2019 sebesar 99.74% dan ditahun 2020 sebesar 99.89 yang masih dapat dikatakan efisien karena masih di bawah 100%

Pada tahun 2021 rasio mengalami penurunan hingga masuk kategori tidak signifikan kategori tidak signifikan karena sudah melampaui 100% yaitu sebesar 100.48%. penurunan rasio efisiensi tersebut diakibatkan pada peningkatan realisasi yang melampaui anggaran pada realisasi pengeluaran sebesar 2,937,42M realisasi pendapatan sebesar 2,923,11M

Pada tahun 2022 merupakan keadaan terbagus dilihat dari rasio efisiensi dengan rasio 90.83% karena memiliki rentan terjauh dari 100%. Pada periode 2019 sampai 2022 dengan realisasi pengeluaran sebesar 2,775,83M dan realisasi pendapatan sebesar 3,065,37M.

### 3. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektifitas dapat dilihat dengan memperbandingkan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Berikut ini hasil analisis rasio efektivitas (Adisty, 2016) :

$$\text{rasio afektivitas 2019} = \frac{2.998,84 \text{ M}}{2.943,21 \text{ M}} \times 100\% = 101.89 \%$$

$$\text{rasio afektivitas 2020} = \frac{2.835,33 \text{ M}}{2.945,41 \text{ M}} \times 100\% = 96.26 \%$$

$$\text{rasio afektivitas 2021} = \frac{2.923,11 \text{ M}}{2.777,29 \text{ M}} \times 100\% = 105.25 \%$$

$$\text{rasio afektivitas 2022} = \frac{3.056,07 \text{ M}}{2.774,77 \text{ M}} \times 100\% = 110.14 \%$$

Rasio Efektivitas Daerah Kabupaten Kediri 2019-2022

Tahun	Presentase	Hasil
2019	101.89 %	Efektive
2020	96.26 %	Cukup Efektive
2021	105.25 %	Efektive
2022	110.14 %	Efektive

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hasil rasio ekonomis adalah sebagai berikut :



Pada tahun 2019 dari rasio efektivitas sudah menyentuh 101.89% masuk kategori efektif karena sudah melebihi 100% dengan realisasi pengeluaran sebesar 2,998,84M dengan anggaran pendapatan sebesar 2,943,21M.

Pada tahun 2020 dari rasio efektivitas mengalami penurunan dengan realisasi pengeluaran sebesar 2,835,33M dan anggaran pendapatan sebesar 2,945,41M dengan rasio yang hanya 96.26 yang masuk kategori cukup efektif.

Pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan pada rasio efektivitas dengan rasio berturut-turut sebesar 105.25% dan 110.14% dengan realisasi pengeluaran sebesar 2,923,11M dan anggaran pendapatan sebesar 2,77,29M pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dengan rasio efektivitas terbesar pada rentan tahun 2019 sampai 2022 sebesar 110.14% dengan realisasi pengeluaran sebesar 3,056,07M dan anggaran pendapatan sebesar 2,774,77M

## KESIMPULAN

Dari tabel realisasi anggaran tersebut menunjukkan jika laporan realisasi anggaran Kabupaten Kediri adalah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jika dilihat dari tahun 2019-2022 pendapatan daerah Kabupaten Kediri mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahunnya meskipun secara tidak signifikan. Dikarenakan masih mengalami pemulihan dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 pendapatan daerah kabupaten Kediri sebesar 2.943,21 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.998,84 Miliar. Pada tahun 2020 pendapatan daerah kabupaten Kediri sebesar 2.945,41 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.835,33 Miliar. Pada tahun 2021 pendapatan daerah kabupaten Kediri sebesar 2.777,29 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 2.923,11 Miliar. Pada tahun 2022 pendapatan daerah kabupaten Kediri sebesar 2.774,77 Miliar dengan realisasi pendapatan sebesar 3.056,07 Miliar.

## REFERENCE

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Adisty, Sahertian. “Analisis Kualitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Salah Satu Syarat Terwujudnya Good Governance,” 2016.
- Alfandi, M., Ribie, M. F., Fitria, M. L., Wahyuni, M. T., Zunaidi, A., Mochamad Alvido Zakaria, & Hidayah, I. (2023). Pemanfaatan Canva Sebagai e-Katalog Dalam Meningkatkan Visibilitas Dan Kehadiran Toko Zaidan di Dunia Digital. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 567–573. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.725>
- Afidah, B. N., & Zunaidi, A. (2022). Sharia Bank’s Directing Management Strategy for Improving Employee Performance. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 642–655. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/290>
- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/216>
- Dian Mawardi, Kukuh Harianto, and Mawar Ratih Kusumawardani. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2022): 72–80. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v1i4.611>.
- Evicahyani, Sagung Inten, and Nyoman Djinar Setiawina. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Unud* 3, no. 2337–3067 (2015): 1–26.
- Hakim, Luqman. “Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 719–31. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art6>.
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228–234. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.514>
- Hamid, Abdul, and Ilyas Lamuda. “Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money.” *Gorontalo Accounting Journal* 2, no. 1 (2019): 31. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i1.556>.

- Hobvi, A. L. J., & Zunaidi, A. (2022). Implementation Of Compliance Management In The Sharia Banking Sector. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 346–362. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/260>
- Indrayani, and Khairunnisa. “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for erintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus PaMoney Pada Pemda Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2301–4717 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>.
- Kurniasari, R., & Zunaidi, A. (2022). Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset (ROA). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 708–742. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/305>
- Leni, I. M., & Zunaidi, A. (2022). Indonesia’s Islamic Banking Strategy For Sustaining Financial Operations During The Pandemic. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 40–49. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/214>
- Polii, I R A, D P E Saerang, S J Tangkuman, and Imanuel R A Polii. “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 781–88.
- Priyanti, E. D., Zunaidi, A. ., & Maghfiroh, F. L. . (2022). The Significance of Risk Management in Reducing Losses and Strengthening The Institutional Structure of Islamic Financial Institutions. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 1–24. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/234>
- Pramono, Joko. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).” *Among Makarti* 7 (2014): 83–112.
- Rachmalia, G., Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2022). Analysis Of Sharia Banking’s Strategy In Facing Technology In The Digital Era. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 422–435. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/262>
- Septiana, P., Zunaidi, A., & Lailatul Maghfiroh, F. (2022). The Sharia Supervisory Board’s (DPS) Role in Sharia Compliance in Sharia Banking. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 124–134. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/227>